Analisis Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas, Pemanfaatan SIAKD dan *Value For Money* Terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi S1 Akuntansi

Disusun Oleh :

Restika Veby Liana

NIM : 31401800144

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

ANALISIS KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS, PEMANFAATAN SIAKD DAN *VALUE FOR MONEY* TERHADAP PENGELOLAAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KANTOR UPPD KABUPATEN PATI

Disusun Oleh :

Restika Veby Liana

NIM. 31401800144

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 30 Januari 2022

Pembimbing

Dr. Winarsih, SE., M.Si., CSRS.

NIK. 211415029

HALAMAN PERSETUJUAN

Analisis Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas, Pemanfaatan SIAKD dan *Value For Money* Terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati

Disusun Oleh :

Restika Veby Liana

NIM : 31401800144

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 11 Februari 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing	Penguji 1
Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS.	**Dr. Chrisna Suhendi, S.E., M.B.A., Ak., CA.**
NIK. 211415029	**NIK. 210493034**

Penguji 2

Hendri Setyawan, S.E., MPA.
NIK. 211406019

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 11 Februari 2022

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si., CSRS.
NIK. 211415029

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Restika Veby Liana
NIM	: 31401800144
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Universitas	: Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas, Pemanfaatan SIAKD dan *Value For Money* Terhadap Pengelolaan Akuntansi Kantor UPPD Kabupaten Pati"** merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam usulan proposal penelitian ini.

Semarang, 30 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

E5AJX879067584

Restika Veby Liana

NIM. 31401800144

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Restika Veby Liana
NIM	: 31401800144
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Alamat Asal	: Rt 08/ Rw 04 Jatiroto, Kayen, Pati
Email	: restikaveby1183@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/~~Tesis/Disetasi~~* dengan judul : **"Analisis Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas, Pemanfaatan SIAKD dan *Value For Money* Terhadap Pengelolaan Akuntansi Kantor UPPD Kabupaten Pati"** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan publikasiannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

Restika Veby Liana

NIM. 31401800144

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Kejarlah selagi kamu masih punya kesempatan"

"Kerjakanlah kewajibanmu secara profesional, bukan karena seseorang melainkan karena Allah"

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Ibu dan Bapak tercinta
- Keluarga tercinta
- Sahabat dan teman-temanku tercinta

ABSTRACT

Public sector accounting management is a process which consisting of recording process, analysis, and interpreting an information on government financial statement in detail and thorough. With the increasing of technology development accompanied by increased public awareness of government administration. The purpose of this research is to analyze and examine the effect of budget goals clarity, accountability, district financial accounting information systems, and value for money on public sector accounting management. This research uses a quantitative approach, research data in the form of primary data through questionnaires along taking the populations as well sample from the staff or employees of the UPPD Pati regency office as many as 40 respondents. The method in determining the sample uses a saturated sample technique. The independent variables in this research are clarity of budget goals, accountability, use of SIAKD and value for money also dependent variable is public sector accounting management. The method used to analyzing the data is multiple linear regression analysis with SPSS software version 24.

The results of the classical assumption test are normal, there is no multicollinearity, and no heteroscedasticity. The results of this research prove that the clarity of budget goals has a significant positive effect on the public sector accounting management, accountability has a significant positive effect on the public sector accounting management, and value for money has a significant positive effect on the public sector accounting management.

Keywords : Clarity of budget goals, accountability, SIAKD, Value for money

ABSTRAK

Pengelolaan akuntansi sektor publik merupakan proses yang didalamnya terdapat proses pencatatan, analisis, serta interprestasi suatu informasi laporan keuangan pemerintah secara detail dan menyeluruh. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi yang diiringi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, sintem informasi akuntansi keuangan daerah dan *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data penelitian berupa data primer melalui kuesioner serta mengambil populasi sekaligus sampe dari staff atau pegawai kantor UPPD Kabupaten Pati sebanyak 40 responden. Metode dalam penentuan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Variabel independen dalam penelitian yaitu kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan SIAKD dan *value for money* serta variabel dependennya yaitu pengelolaan akuntansi sektor publik. metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis regresi linear berganda dengan software SPSS versi 24.

Hasil uji asumsi klasik normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik, pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik dan *value for money* berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik.

Kata kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas, SIAKD, *Value For Money*

INTISARI

Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, efisien, transparan serta bertanggung jawab. Beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan akuntansi sektor publik antara lain yaitu mengenai legalitas dalam hal penerimaan maupun pengeluaran dari organisasi sektor publik, dan pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan secara baik, perlindungan aset-aset fisik serta finansial, dan juga mencegah terjadinya pemborosan aset ataupun salah dalam penanganannya. Terdapat banyak sekali faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan akuntansi sektor publik. maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menganalis dan mengetahui pengaruh dari kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan SIAKD, *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. terdapat 4 hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

(1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik,

(2) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik,

(3) Pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik,

(4) *Value for money* berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi didasarkan bahwa pengelolaan pemerintah daerah sebaiknya diawasi untuk memastikan

pengelolaan yang dilakukan penuh dengan kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku sedangkan teori penetapan tujuan didasarkan bahwa sesorang apabila mampu memahami sebuah tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kinerjanya. Didukung oleh penelitian dari (Saskia et al., 2020) dan diperkuat oleh penelitian (Sriwijayanti, 2018).

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda sebagai pengujian langsung. Data yang digunakan ialah data primer yang berupa kuesioner terhadap staff/pegawai kantor UPPD Kabupaten Pati sebanyak 40 responden secara offline dengan menggunakan *paper*. Sedangkan untuk metode pengambilan menggunakan teknik sampel jenuh serta diolah dengan menggunakan software SPSS versi 24.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik (hipotesis 1 diterima), akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik (hipotesis 2 diterima), pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik (hipotesis 3 diterima) serta *value for money* berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik (hipotesis 4 diterima).

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Proposal Penelitian / Skripsi dengan Judul "Analisis Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas, Pemanfaatan SIAKD dan *Value For Money* Terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati". Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu prasyarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi dan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi banyak sekali mendapatkan bimbingan, dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan motivasi dalam menjalani perkuliahan.
2. Ibu Dra. Winarsih, SE., M.Si., selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya, serta senantiasa memberikan arahan, nasihat, dan motivasi sehingga Proposal Penelitian ini dapat selesai dengan hasil dan usaha yang maksimal.
3. Bapak, Ibu, Adik dan Keluarga Besar saya yang telah memberikan semangat dan menanamkan arti kehidupan yang sebenarnya sehingga dapat berkuliah dan menyelesaikan tugas – tugas perkuliahan dengan baik.

4. Semua sahabat dari Akuntansi 2018 dan KMFE UNISSULA yang telah memberikan semangat serta bantuan yang besar dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua pihak lain yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca.

Semarang, 30 Januari 2022

Penulis

Restika Veby Liana
NIM. 31401800144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **Error! Bookmark not defined.**
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
ABSTRACT vii
ABSTRAK viii
INTISARI ix
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Pertanyaan Penelitian 8
1.4 Tujuan Penelitian 9
1.5 Manfaat Penelitian 9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Landasan Teori 11
2.1.1 Teori Agensi 11
2.1.2 Teori Penetapan Tujuan 12
2.2 Variabel Penelitian 13
2.2.1 Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik 13
2.2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran 17
2.2.3 Akuntabilitas 19
2.2.4 Pemanfaatan SIAKD 21

2.2.5 Value For Money 23
2.3 Penelitiaan Terdahulu 26
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis 29
2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 29
2.4.2 Pengembangan Hipotesis 31
BAB III METODE PENELITIAAN 36
3.1 Jenis Penelitian 36
3.2 Populasi dan Sampel 36
3.2.1 Populasi 36
3.2.2 Sampel 37
3.3 Sumber dan Jenis Data 37
3.4 Metode Pengumpulan Data 38
3.5 Variable, Definisi Operasional, dan Indikator 38
3.5.1 Variable 38
3.5.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variable 39
3.6 Teknik Analisis 44
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 44
3.6.2 Uji Kualitas Data 44
3.6.3 Uji Asumsi Klasik 45
3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda 46
3.6.5 Uji Kebaikan Model 47
3.6.6 Pengujian Hipotesis 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
4.1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian 50
4.2. Identitas Responden 51
4.2.1. Identitas responden berdasarkan lama bekerja 51
4.2.2. Identitas responden berdasarkan pendidikan tingkat terakhir 51
4.2.3. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin 52
4.2.4. Identitas responden berdasarkan umur 53
4.3. Teknik Analisis 54
4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif 54
4.3.2. Analisis Deskripsi Responden 55

4.3.3. Uji Kualitas Data 60
4.4 Uji Asumsi Klasik 62
4.4.1. Uji Normalitas Data 62
4.4.2. Uji Multikolinieritas 64
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 65
4.5. Analisis Regresi Linier Berganda 67
4.6 Uji Kebaikan Model 69
4.6.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 69
4.6.2. Uji Koefisien Determinasi (*Adjust R Square*) 71
4.7. Pengujian Hipotesis 71
4.7.1. Uji Parsial (Uji Statistik t) 71
4.8. Pembahasan Hasil Penelitian 73
4.8.1. Kejelasan Sasaran Anggaran 73
4.8.2. Akuntabilitas 74
4.8.3. Pemanfaatan SIAKD 75
4.8.4. *Value For Money* 76
BAB V PENUTUP 77
5.1. Kesimpulan 77
5.2. Keterbatasan Penelitian 79
5.3. Saran 79
5.3.1. Bagi Akademisi 79
5.3.2. Bagi Pemerintah 80
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN - LAMPIRAN 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil penelitian terdahulu kejelasan sasaran anggaran.....26
Tabel 2.2 Hasil penelitian terdahulu akuntabilitas.....27
Tabel 2.3 Hasil penelitian terdahulu pemanfaatan SIAKD.....28
Tabel 2.4 Hasil penelitian terdahulu *value for money*.....29
Tabel 2.5 Kerangka Pemikiran.....31
Tabel 3.1 Modified likert-type.....38
Tabel 3.2 Indikator Variabel.....43
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....50
Tabel 4.2 Lama Bekerja.....51
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir.....52
Tabel 4.4 Jenis Kelamin.....52
Tabel 4.5 Umur Pegawai.....53
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel.....54
Tabel 4.7 Deskripsi variabel pengelolaan akuntansi sektor publik.....56
Tabel 4.8 Deskripsi variabel kejelasan sasaran anggaran.....57
Tabel 4.9 Deskripsi variabel akuntabilitas.....58
Tabel 4.10 Deskripsi variabel pemanfaatan SIAKD.....58
Tabel 4.11 Deskripsi variabel *value for money*.....59
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas.....60
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas.....61
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinieritas.....65
Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....66
Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....68
Tabel 4.17 Hasil Uji Statistik F.....70
Tabel 4.18 Hasil Koefisien Determinasi (Adjust R2).....71
Tabel 4.19 Hasil Uji Statistik t.....72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Data (Kolmogorov Smirnov).....63
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Probability Plot.....64
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Grafik Scatterplot).....67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Fakultas.....84
Lampiran 2 Tanda Izin Pengambilan Data Penelitian.....85
Lampiran 3 Format Kuesioner.....86
Lampiran 4 Tabulasi Data.....92
Lampiran 5 Analisis Deskripttif.....97
Lampiran 6 Hasil Uji Kualitas Data.....99
Lampiran 7 Hasil Output SPSS 24.0.....100
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian.....103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang - Undang no. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah suatu pemberian hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan sistem keuangan yang baik untuk mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersifat Akuntabel dan efisien

Akuntansi sektor publik merupakan sebuah proses yang didalamnya terdapat proses pencatatan, analisis, dan interprestasi suatu informasi laporan keuangan pemerintah secara detail. Sistem Akuntansi ini digunakan oleh lembaga publik atau pemerintahan sebagai pertanggung jawaban terhadap masyarakat dalam mengelola keuangan. Dalam mengelola laporan keuangan, pemerintah diharapkan agar memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yaitu harus tepat dalam mengelola anggaran, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan serta bisa mengawasi agar rencana dan realisasi anggaran bisa tercapai dengan baik.

Perkembangan teknologi yang diiringi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan penyelenggaraan administrasi menjadi tuntutan agar adanya peningkatan kinerja instansi sektor publik, yang harus

beriringan dengan meningkatnya rasa tanggung jawab dari masing masing pejabat negara agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Keluhan dan aduan terkait pelayanan pada kantor sektor publik baik secara langsung maupun melalui media sosial seperti laporan keuangan yang belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Bahkan keluhan terhadap sikap pejabat atau karyawan yag tidak reseptif terhadap masyarakat. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan sektor publik antara lain yaitu kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan *value for money*.

Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam melaksanaakan perealisasian. Secara tidak langsung ini akan mempengaruhi kinerja aparat. Salah satu penyebab ketidak efektifan dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan dari sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyusun target – target anggaran.

Dalam rangka melakukan akuntabilitas publik dari pemerintah daerah sebagai pengelola dana publik harus dapat memberikan suatu informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, relevan, konsisten, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), untuk itu pemerintah daerah seharusnya mempunyai sistem informasi akuntansi yang handal.

Akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah sangat penting karena salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dana daerah. Pengelolaan akuntansi yang buruk maka akan merugikan banyak pihak baik masyarakat maupun negara. Sehubungan dengan otonomi daerah, maka diperlukan pengelolaan secara vertikal (kepada pemerintah) maupun secara horizontal (kepada masyarakat daerah) untuk pengelolaan dana yang disediakan oleh pemerintah pusat. Mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akuntabilitas dalam pandangan Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai tanggungjawab seorang yang terdapat pada surat Al-Zalzalah ayat 7 – 8 yang mempunyai arti *"(7) Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. (8) dan Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula."*

Dalam Permendagri No. 59 tahun 2007, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan suatu

laporan yang handal, relevan, serta tepat waktu guna menghasilkan suatu informasi yang berbentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak pemerintah maupun non-pemerintah dalam kebijakan pengambilan keputusan. Proses penyusunan laporan keuangan dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang paham dan kompeten dalam dunia akuntansi pemerintahan serta paham mengenai organisasi dari pemerintahan.

Menurut (Defitri, 2018) anggaran yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah haruslah dapat memenuhi keinginan dari masyarakat. Bagaimanapun pemerintah adalah pelayan masyarakat, hal ini disebabkan oleh peran penting dalam mewujudkan suatu optimalisasi dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu tujuan yang penting dari keberadaan organisasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh (Kadek Sri Dewi Asih et al., 2021) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif serta telihat signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2017) akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dalam analisa reformasi yang dilakukan oleh (Al-Hakim, 2019) menghasilkan kebijakan terkait Open Government yang menghasilkan empat prinsip kebijakan, yaitu (Al-Hakim, 2019) merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan *Open Government* yang sejalan dengan konsep *Value For Money*. Dengan tetap memegang komitmen yang sudah tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945

Pasal (23-1) yang menetapkan bahwasannya anggaran negara “harus dilaksanakan secara terbuka serta akuntabel”. Dan juga komitmen pemerintah yang sudah tertuang dalam RPJMN tahap ketiga (2015-2019) serta keberlanjutan dari Program Nawa Cita pada butir kedua yang berbunyi : membangun pemerintah yang “bersih, efektif, demokratis dan terpecaya”. Dengan berlandaskan itu semua, sangat disayangkan kebijakan – kebijakan tersebut belum terlaksana sepenuhnya.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu bentu keberhasilan dalam menjalankan tugas yang bertujuan untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya peningkatan kesadaran serta perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan perekonomian negara. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku pengelola dari dana publik harus mampu dalam menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, dapat dipercaya serta tepat waktu. Untuk itu aparat pemerintah harus dapat mengetahui anggaran pemerintah daerahnya agar tidak ada informasi asimetris dalam pengelolaan keuangan daerahnya (Defitri, 2018).

Kabupaten Pati merupakan salah satu bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pati dalam menjalankan roda pemerintahannya memerlukan dana yang cukup besar untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Anggaran penerimaan pendapatan Kabupaten Pati tersebut dominan didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah.

Organisasi Sektor Publik yang bertanggungjawab terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang dimana terbagai menjadi 6 koordinator wilayah. Salah satunya yaitu Koordinator Pati yang diantaranya adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kabupaten Pati. Seperti yang diketahui pada situs resmi kantor UPPD Kabupaten Pati belum adanya pembaharuan yang menggambarkan keadaan pada masa sekarang, baik dalam program - program ataupun keadaan anggaran serta pengelolaan sektor publik kantor tersebut. Untuk mengetahui seberapa baik kinerja dalam pengelolaan akuntansi sektor publik Kantor UPPD Kabupaten Pati maka dilakukan analisis yang berbasis *Value For Money*.

Islam mengajarkan bagi para pemeluknya mengenai prinsip ekonomi Islam yaitu untuk terus berproduktif dan menekuni segala bentuk aktivitas ekonomi seperti perdagangan, industri, pertanian dan masih banyak lagi. Karena apapun itu perbuatan kita dalam hal menghasilkan benda ataupun pelayanan yang bermanfaat bagi sesama manusia maupun lingkungan merupakan amal baik bagi kita.

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk merubahnya sendiri. Yang terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'ad ayat 11 yang artinya *"Bagi manusia ada malaikat – malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kamu sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri*

mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali – kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan (Saskia et al., 2020) bahwa kejelasan sasaran anggaran, perwujudan nilai transaparansi, pengendalian akuntansi, akuntabilitas dan value for money berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial kejelasan sasaran anggaran, perwujudan nilai transaparansi, pengendalian akuntansi, akuntabilitas dan value for money berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Yang membedakan dalam penelitian ini adalah terdapat penambahan variabel yaitu Pemanfaatan SIAKD yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Sriwijayanti, 2018) sebagai variabel independen. Selain itu juga, pada penelitian ini menerapkan metode survei melalui kuisoner dengan penambahan open kuisoner, agar data responden lebih menggambarkan kondisi sebenarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan *research gap* dari uraian latar belakang diatas ditemukan masalah "masih adanya ketidakpastian hasil analisis mengenai sasaran anggaran, akuntabilitas, penerapan SIAKD dan *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik kantor UPPD Kabupaten Pati, yang dimana kejelasan sasaran anggaran bisa meningkatkan kepercayaan

masyarakat, akuntabilitas mengukur seberapa bertanggungjawabnya pejabat atau karyawan dalam menjalankan profesi, penerepan sistem akuntansi keuangan daerah di segala aspek laporan keuangan, dan penerapan *value for money* yang merupakan pinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang paling dasar". Oleh karena itu masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : "Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, penerapan SIAKD dan *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik kantor UPPD Kabupaten Pati ?".

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini mencoba menganalisis tentang variabel kejelasan sasaran anggaran., akuntabilitas, penerapan SIAKD, dan *value for money* sebagai variabel Independen dan Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati sebagai variabel Dependen. Oleh karena itu pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut :

1. Apakah Kejelasan Aggaran berpengaruh terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik ?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik ?
3. Apakah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik ?
4. Apakah *Value For Money* berpengaruh terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Kejelasan Aggaran terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati.
4. Untuk menganilisis dan mengetahui pengaruh *Value For Money* terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang organisasi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai wacana dalam memberikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan akuntansi di sektor publik.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori Keageanan menurut (Ninla Elmawati Falabiba, 2019) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Teori agensi mengasumsikan bahwa agen lebih banyak memiliki informasi daripada prinsipal. Hal ini, disebabkan karena prinsipal tidak dapat mengawasi semua kegiatan yang dilakukan agen secara berkala. Situasi inilah yang disebut asimetri informasi atau dapat disebut dengan ketidakseimbangan informasi. Karena prinsipal tidak mempunyai informasi yang memadai atau cukup mengenai kinerja dari agen, maka dari itu prinsipal tidak dapat memastikan bagaimana kinerja agen dalam memberikan kontribusi pada perusahaan.

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai prinsipal adalah rakyat dan yang bertindak sebagai agen adalah pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan demi kesejahteraan rakyat. Maka dari itu pengelolaan pemerintah daerah sebaiknya diawasi untuk memastikan pengelolaan yang dilakukan penuh dengan kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah mengenai informasi yang diterima oleh

masyarakat menjadi lebih berimbang, yang artinya *information asymmetry* yang terjadi setidaknya bisa berkurang. Semakin berkurangnya resiko *information asymmetry* maka kemungkinan terjadinya korupsi juga menjadi lebih kecil.

2.1.2 Teori Penetapan Tujuan

Teori penetapan tujuan adalah salah satu bentuk teori motivasi yang didasari pada premis bahwa jikalau seseorang memiliki suatu kebutuhan yang dapat diingat ataupun dipikirkan sebagai *outcomes* tertentu atau sasaran yang diharapkan agar dapat tercapai. Penetapan sebuah tujuan merupakan suatu cara manajemen dalam melakukan penetapan sasaran atau tujuan untuk keberhasilan mencapai kinerja. Teori penetapan tujuan menekankan pada pentingnya sebuah hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan kinerja yang dihasilkan. Terdapat lima prinsip dalam penetapan tujuan, yaitu :

a. Tujuan harus jelas
b. Tujuan harus mempunyai tingkat kesulitan menengah sampai tinggi
c. Karyawan harus menerima tujuan tersebut
d. Karyawan harus menerima feedback mengenai kemajuannya dalam usaha mencapai tujuan tersebut
e. Tujuan yang ditentukan secara partisipastif lebih baik daripada tujuan yang ditentukan begitu saja.

Dalam penelitian ini, teori penetapan tujuan digunakan untuk menjelaskan bagaimana kinerja karyawan dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan. Setiap organisasi yang sudah menetapkan target yang dirumuskan ke dalam sebuah rencana anggaran lebih mudah untuk mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi dari organisasi tersebut. Anggaran yang ditetapkan secara pasrtisipasi menggunakan sebuah informasi agar keryawan dapat mengumpulkan, bertukar dan menyebarkan *job relevant information* dan manajer akan memperoleh kepuasaan jika dilibatkan dalam sebuah partisipasi penganggaran untuk bertukar informasi sehubungan dengan pekerjaan dan penetapan target kinerja mereka. Konsep dasarnya yaitu sesorang apabila mampu memahami sebuah tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kinerjanya.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi merupakan suatu proses identifikasi, pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian suatu laporan serta penginterpretasian atas hasil.

Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, efisien, transparan serta

bertanggung jawab. Karakteristik dari akuntansi sektor publik, antara lain :

a. Berfokus dengan sifat lembaga atau organisasi non profit
b. serta tidak bertujuan untuk menghasilkan laba
c. Berfokus pada suatu tujuan lembaga yang hanya menyajikan informasi – informasi pelayanan kepada publik guna kesejahteraan bersama
d. Bergerak pada lingkungan yang *turbulence* dan kompleks.

Agar bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dari itu setiap pelaku organisasi dalam membuat laporan keuangan menyesuaikan dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasional dikenal dengan *International Accounting Standars Board* (IASB) yang sekarang dikenal dengan *International Financial Reporting Standar* (IFRS).

Aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan keuangan sektor publik yaitu mengenai legalitas dalam hal penerimaan maupun pengeluaran dari organisasi sektor publik, serta pengelolaan keuangan yang dilakukan secara baik, perlindungan aset – aset fisik dan finansial, dan juga mencegah terjadinya suatu pemborosan aset ataupun salah dalam penanganannya.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan sektor publik, pemerintah harus terbuka atas seluruh informasi yang didapatkan serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat (Putra, 2017). Keterbukaan dari

sebuah informasi serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan keuangan sektor publik merupakan awal dalam perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana pembangunan pada berbagai tingkat.

Sesuai dengan Permendagri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan akuntansi sektor publik, antara lain yaitu : standart akuntansi keuangan sektor publik dan sistem akuntansi keuangan sektor publik. Standart akuntansi keuangan sektor publik merupakan standar dalam penyusunan laporan pencatatan, pembukuan dan pelaporan keuangan suatu instansi sektor publik. sedangkan sistem akuntansi keuagan sektor publik adalah sistem yang digunakan oleh instansi sektor publik dalam pengelolaan keuangannya.

Dalam penelitian ini, analisis pengelolaan keuangan sektor publik yang diperlukan antara lain :

a. Kejelasan Sasaran Anggaran

   Pengelolaan keuangan sektor publik sudah seharusnya memperhatikan terkait kejelasan suatu anggaran terhadap program – program kerja pada periode tertentu. Agar tidak

terjadinya penyelewengan oleh pihak tertentu mengenai sasaran anggaran yang sudah ditetapkan.

b. Akuntabilitas

Dalam hal ini, pengambilan suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai amanah atau mandat yang diterima. Kebijakan – kebijakan yang dihasilkan dapat diakses serta dikomunikasikan secara horizontal maupun vertikal dengan baik, mencakup kerugian suatu daerah, surat berharga dan aset yang nyata dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Penggunaan teknologi berupa sistem informasi juga berkaitan erat dalam hal pengelolaan akuntansi sektor publik. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah diperlukan untuk menunjang dalam pengelolaan laporan keuangan, baik dalam proses maupun pencatatan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas atau program kerja yang telah dilaksanakan.

d. Value for money

Pengukuran keberhasilan pelaksanaan suatu otonomi daerah yaitu apabila terjadinya sebuah peningkatan dalam hal pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi semakin maju, keadilan, dan juga

adanya keserasian hubungan antar pusat dan daerah maupun daerah antar daerah.

2.2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran yaitu suatu gambaran kuantitatif dari sebuah tujuan manajemen serta mempunyai peran sebagai alat dalam menentukan kemajuan dari suatu target yang telah ditentukan. Menurut (Ninla Elmawati Falabiba, 2019) tujuan anggaran disusun yaitu untuk membantu pihak manajemen dalam mengkomunikasikan tujuan organisasi pada unit organisasi, berperan sebagai alat untuk mengkoordinir kegiatan dan juga sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja dari para manajer.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah sistem dalam perancangan, taksiran perhitungan serta penilaian yang lebih mengutamakan terhadap keterkaitan anggaran dengan situasi yang diinginkan (Safaruddin & Basri, 2016). Penyusunan sasaran anggaran yang tidak efektif dan juga tidak berorientasi terhadap kinerja dapat menggagalkan sebuah perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. Maka dari itu kejelasan sasaran anggaran menjadi salah satu hal yang relevan dan juga penting di lingkup pemerintahan.

Menurut (Ninla Elmawati Falabiba, 2019) Kejelasan sasararan anggaran yaitu untuk mengukur seberapa jelas dan spesifik tujuan anggaran ditetapkan agar dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Sementara itu (Wardani & Silvia, 2021) ketika telah diraih sebuah pencapaian seperti yang diharapkan, maka akan sangat memudahkan pihak lembaga dalam mencapai keberhasilan dari pengoperasian tugas yang berupa sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan tujuan agar seluruh anggaran yang ditetapkan secara jelas dan detail dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas semua pencapaian sasaran anggaran tersebut. Organisasi memerlukan anggaran untuk merancang strategi dalam melakukan perencanaan baik sasaran jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan dari anggaran yang tidak jelas menyebabkan pelaksana anggaran menjadi tidak puas terhadap kinerjanya. Maka dari itu, kejelasan sasaran anggaran mempunyai dampak dalam menyiapkan anggaran yang sesuai dengan target yang akan dicapai.

Dalam menganalisis kejelasan sasaran anggaran ada beberapa hal perlu diperhatikan antara lain yaitu : sasaran anggaran secara prioritas, standart sasaran anggaran dan kinerja anggaran. Pendistribusian alokasi aggaran haruslah dimulai dari prioritas terlebih dahulu, sehingga anggaran tersebut dapat terserap dengan maksimal. Kaidah – kaidah yang terdapat dalam standart sasaran anggaran perlu diperhatikan dalam pengelolaan akuntansi sektor publik. Pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran sangatlah penting dengan tujuan pemaksimalan sasaran anggaran agar terealisasi sesuai dengan rancangan anggaran yang ada.

2.2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin yaitu : *accomptare* (mempertanggungjawabkan). Akuntabilitas merupakan konsep etika yang dekat dengan administrasi sektor publik yang memiliki beberapa pengertian, antara lain yaitu :

a. Kemampuan dalam memberikan sebuah jawaban (answerability)
b. Dapat dipertanggungjawabkan

Dalam bidang akuntansi, akuntabilitas bisa diartikan sebagai pertanggungjawaban. Suatu organisasi dapat dikatakan akuntabel jika mempunyai kemampuan dalam menjelaskan kondisi atau situasi yang dialami termasuk dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas pengelolaan akuntansi yang baik yaitu dapat memberikan informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan mereka bisa menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Laporan keuangan pemerintah seharusnya dapat memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan masyarakat luas, sebagai acuan dalam pembuatan keputusan atas ekonomi, sosial maupun politik.

Akuntabilitas publik berarti pemberian suatu informasi atas segala aktivitas dan juga kinerja pemerintah kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut (Isnanto et al., 2019).

Menurut Inpres no 7 tahun 1999, akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban baik individu maupun organisasi dalam mengelola sumber daya yang sudah diberikan guna pencapaian target melalui laporan keuangan dan kinerja secara periodik.

Menurut (Putra, 2017) akuntabilitas meliputi suatu eksitensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terkait aksi yang dilakukannya dalam menggunakan sumber – sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitasnya sebuah kegiatan dalam pencapian dari sasaran suatu program yang sedang dijalankan.

Menurut (Prawira, 2017) akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saskia et al., 2020) hasil pengujian secara simultan maupun secara parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik

Dalam pengelolaan akuntansi sektor publik, penilaian terhadap akuntabilitasi terdapat lima antara lain yaitu : akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, akuntabilitas hukum dan akuntabilitas finasial.

2.2.4 Pemanfaatan SIAKD

Pada umumnya sistem informasi akuntansi digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu analisis kepurtusan ataupun digunakan sebgaai pembuat keputusan yang terkait dengan transaksi – transaksi perusahaan ataupun instansi (Mulyani et al., 2018)

Menurut Laudon (2000) dalam penelitian (Rohmah et al., 2020) Sistem informasi yaitu beberapa komponen yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan serta mendistribusikan informasi dalam rangka untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi.

Tujuan dari sistem akuntansi pemerintah daerah yaitu sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan dasar hukum yang dimulai dari UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sampai PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Menurut (Defitri, 2018) Laporan Keuangan dikatakan baik dan juga berkualitas ketika mampu memberikan informasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan untuk mengambil keputusan oleh pemangku kepentingan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kemampun dalam memberikan informasi yang memenuhi kebutuhan pemakai didalam mengambil suatu keputusan serta dapat dipahami.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dipengaruhi oleh bagaimana dalam melakukan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi. Seseorang dikatakan mengerti terhadap akuntansi ketika dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan berpodaman pada prinsip dan standar yang berlaku serta berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Seperti halnya penelitian dari (Kadek Sri Dewi Asih et al., 2021) apabila sistem akuntansi keuangan daerah semakin baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik pula. Hal ini berbanding lurus dengan semakin baiknya pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan akuntansi sektor publik.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan sebuah penerapan sistem informasi akuntansi oleh organisasi sektor publik atau lembaga pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan suatu teknologi dari sistem informasi dapat diukur dari beberapa faktor berikut ini :

a. Penggunaan teknologi dapat menambah produktivitas dari penggunanya
b. Penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja pengguna

c. Penggunaan teknologi membantu dalam efisiensi proses yang harus dilakukan oleh penggunanya

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah erat hubungannya dengan suatu prosedur pengukuran, pencatatan, penggolongan dan juga pelaporan akuntansi yang digunakan untuk suatu pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan masa depan dari pemerintah daerah tersebut.

Jikalau sistem informasi akuntansi keuangan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka laporan keuangan yang dihasilkan juga lebih baik dan berkualitas.

Beberapa hal dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang menjadi acuan pengelolaan akuntansi sektor publik, antara lain yaitu : sistem informasi akuntansi memenuhi prinsip kecepatan dan mampu menyediakan informasi secara tepat waktu, sistem informasi akuntansi dapat dipahami dan mudah digunakan oleh setiap pengguna yang berkepentingan, sistem informasi akuntansi dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan internet, sistem informasi akuntansi menghasilkan informasi yang lebih berkualitas, bernilai dansesuai dengan kebutuhan pengguna informasi.

2.2.5 Value For Money

Menurut (Sayuti, 2018) Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan input paling kecil untuk mencapai output

yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun konsep value for money sebagai berikut:

1. Ekonomi berkaitan dengan hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Pengertian ekonomi sering disebut kehematan yang mencakup mengenai pengelolaan secara hati – hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.
2. Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi, pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua –duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*).
3. Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif

apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Publikasi OECD (2016) merekomendasikan bahwa Pemerintah Indonesia agar menanamkan kebijakan *Open Government*. Menurut OECD (2016) kebijakan *Open Government* merupakan suatu alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari kehidupan demokratis dalam sebuah negara yang bertujuan untuk memperbaiki pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal – hal pokok dari *Open Government* antara lain yaitu :

a. Memastikan hasil dari kebijakan yang lebih baik lagi
b. Meningkatkan tingkat efisiensi serta efektivitas dari kebijakan tersebut
c. Memperbaiki kepatuhan masyarakat terhadap suatu kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan
d. Mendorong dalam pengembangan sosial-ekonomi inklusif
e. Membina inovasi dan mengembangkannya lebih lanjut

Inisiatif Pemerintah Indonesia untuk menerapkan dari kebijakan *Open Government* sejalan dan berkaitan dengan konsep *Value For Money*.

Inti dari sebuah pengukuran kinerja *value for money* dalam suatu pengelolaan akuntansi sektor publik yaitu kinerja dari pemerintah tidak dapat dinilai dalam output yang dihasilkan tetapi dapat dilihat secara terintegrasi dalam mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome*.

2.3 Penelitiaan Terdahulu

Penelitian mengenai Analisis Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas, Pemnfaatan SIAKD dan Value For Money Terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. **Penelitian tentang analisis kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik**

   Penelitian yang dilakukan oleh (Saskia et al., 2020) yang meneliti tentang analisis kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik menghasilkan kesimpulan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Fitria, 2017) yang meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap *budgetary slack* menghasilkan kesimpulan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap *budgetary slack.*

Tabel 2.1 Penelitian tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Hasil Peneliti
1.	**(Saskia et al., 2020)**	Berdasarkan hasil pengujian secara simultan maupun secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik
2.	**(Fathia et al., 2017)**	Kejelasan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

3.	**(Candrakusuma & Jatmiko, 2017)**	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD
4.	**(Isnanto et al., 2019)**	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5.	**(Fitria, 2017)**	Kejelasan Sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap *budgetary slack.*

2. Penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik

Penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2018) mengenai analisis akuntabilitas terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik menghasilkan kesimpulan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Sedangkan menurut (Putra, 2017) menyimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik.

Tabel 2.2 Penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap akuntansi sektor publik

No	Nama Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	**(Saskia et al., 2020)**	Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik
2.	**(Sriwijayanti, 2018)**	Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan APBD
3.	**(Nasution, 2018)**	Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
4.	**(Putra, 2017)**	Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah

3. **Penelitian tentang pengaruh pemanfaatan SIAKD terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik**

Penelitian yang dilakukan oleh (Sriwijayanti, 2018) mengenai analisis pemanfaatan SIAKD terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik menghasilkan kesimpulan bahwa pemanfaatan SIAKD berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Defitri, 2018) mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mengasilkan kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.3 Penelitian tentang pengaruh pemanfaatan SIAKD terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik

No	Nama Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	**(Sriwijayanti, 2018)**	Pemanfaatan SIAKD berpengaruh terhadap pengelolaan APBD
2.	**(Rohmah et al., 2020)**	Pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3.	**(Kartika et al., 2017)**	Pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual
4.	**(Defitri, 2018)**	Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. **Penelitian tentang pengaruh *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik**

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Saskia et al., 2020) mengenai analisis *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik menghasilkan kesimpulan bahwa *value for money* berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Sedangkan menurut (Harmain et al., 2020) menyimpulkan *value for money* belum mampu berperan secara optimal terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik.

Tabel 2.4 Penelitian tentang pengaruh value for money pengaruh pengelolaan akuntansi sektor publik

No	Nama Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	**(Harmain et al., 2020)**	Value For Money tergolong belum baik
2.	**(Saskia et al., 2020)**	Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik
3.	**(Sahin, 2019)**	Belum optimalnya kinerja keuangan Pemerintah berdasarkan Value For Money

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pemahaman mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan sektor publik sangatlah penting karena jika pegawai pemerintahan tidak paham mengenai standar akuntansi sektor publik dan sistem akuntansi keuangan sektor publik maka akan sangat

beresiko tinggi dalam proses penyusunan laporan keuangan tersebut. Pengetahuan akan standart akuntansi keuangan sektor publik dan sistem akuntansi sektor publik merupakan hal dasar untuk penyusunan anggaran yang baik sehingga akan mempengaruhi dalam proses perencanaan dan realisasi kejelasan sasaran anggaran dalam pengelolaan akuntansi sektor publik, karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bisa mencakup semua kebutuhan masyarakatnya dan bisa menargetkan sasaran anggaran sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Akuntabilitas juga mempengaruhi dalam hal pengelolaan akuntansi sektor publik. Dengan menerapkan beberapan poin antara lain yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas kebijakan, akuntabillitas program, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas finansial. Beberapa hal itu yang menjadi perhatian dalam melaksanakan pengelolaan akuntansi sektor publik. agar output yang ada bisa menjadi lebih baik dan menghasilkan laporan keuangan yang baik yaitu laporan yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi manapun.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah mempunyai andil dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang baik, agar proses penyusunannya tetap memperhatikan kaidah – kaidah dalam akuntansi dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan.

Tidak hanya kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tetapi konsep

value for money juga penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Dengan *value for money* konsep pengelolaan organisasi sektor publik mempunya tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisien dan efektif sehingga dapat mendukung dalam proses pengelolaan akuntansi sektor publik yang lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan hubungan antar variabel sebagai berikut :

Tabel 2.5 Kerangka Pemikiran

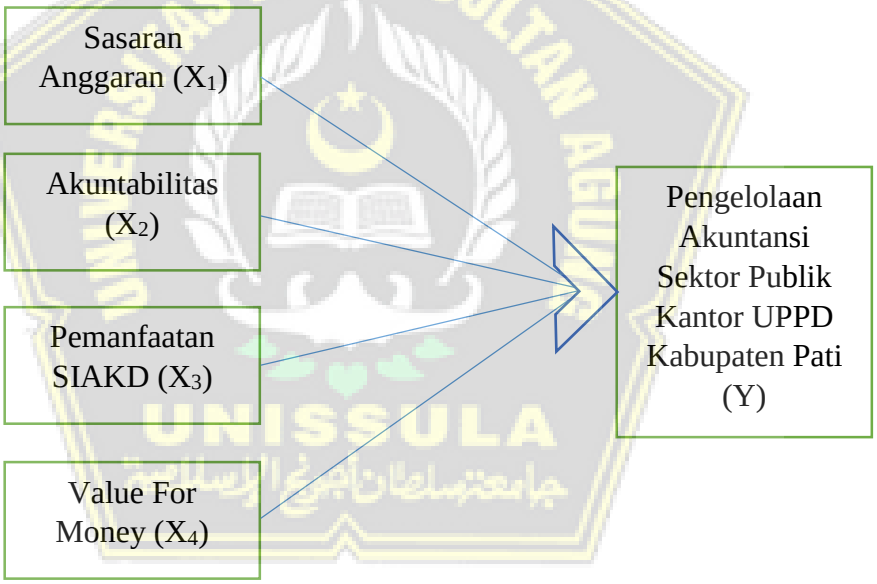

2.4.2 Pengembangan Hipotesis

Perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh analisis sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan SIAKD dan *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik kantor UPPD Kabupaten Pati. Berdasarkan pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Aggaran terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati.

Dalam menghasilkan kejelasan sasaran anggaran yang baik, tahap – tahap yang harus dicapai diantaranya Sasaran yang hendak dicapai harus jelas atau terjabarkan secara terperinci, sasaran dirumuskan secara spesifik agar tujuan yang dibuat bisa dicapai serta sasaran yang mudah dimengerti, terarah serta terukur. Jikalau kejelasan sasaran anggaran sudah tertata dengan baik maka akan memberikan hasil yang baik pula terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik.

Kejelasan sasaran anggaran diterapkan menggunakan teori penetapan tujuan atau sering disebut dengan Goals Setting. Dengan mendasarkan pada teori ini, dalam membuat planning ataupun rancangan anggaran bisa terstuktur dan tepat sasaran. Sehingga mendukung dalam pengelolaan akuntansi sektor publik dengan lebih baik.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Saskia et al., 2020) mengatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik. Maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut :

H1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik

2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati.

Akuntabilitas pengelolaan akuntansi yang baik yaitu dapat memberikan informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan mereka bisa menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Hal ini berpengaruh terhadap penilaian masyarakat atas pengelolaan akuntansi sektor publik.

Sesuai dengan teori agency yaitu masyarakat yang bertindak sebagai principal dan pemerintah sebagai agen. Maka dari itu pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Silvia, 2021) menjelaskan bahwa tiap menambahnya pemahaman yang baik mengenai suatu tujuan anggaran, maka cenderung akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja yang hendaknya juga akan mengalami peningkatan. Maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik

3. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati.

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan suatu komponen yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan serta mendistribusikan informasi dalam rangka untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Maka dari itu pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangatlah penting dalam pengelolaan akuntansi sektor publik.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan dari instansi terkait. Hal ini berkaitan dengan teori penetapan tujuan yaitu dalam proses memudahkan suatu instansi dalam melakukan pengelolaan laporan keuangan ataupun dalam mengelola anggaran yang tersedia agar bisa sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah menyatakan bahwa suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data sebagai proses pengelolaan dari keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat luas dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut :

H3 : Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik

4. Pengaruh *Value For Money* terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati.

Value for money memiliki tiga elemen utama yang menjadi dasar penilaian yaitu ekonomi, efisien dan efektif. Ketiganya ini berkaitan erat dengan pengelolaan akuntansi sektor publik.

Salah satu alasan keberhasilan dari suatu program tidak bisa dipungkiri berasal dari kinerja organisasi sektor publik itu sendiri. Penerapan Value for money dengan berlandaskan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisien dan efektif yang berkaitan erat dengan teori penetan tujuan ataupun teori agensi. Teori penetapan tujuan yang menjadi landasan dari kinerja suatu organisasi dalam hal perencanan anggaran yang ekonomis, efisien serta efektif dan dilengkapi dengan teori agensi yang menuntut suatu instansi pemerintahan atau agen agar bisa menyusun laporan keuangan secara efektif dan efisien agar bisa dipertanggungjawabkan kepada principal atau masyarakat.

Maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut :

H4 : *Value for money* berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik

BAB III
METODE PENELITIAAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan dengan filsafat *positivism* yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sample tertentu. Data kuantitatif memiliki sebuah kecenderungan yang dapat dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Data yang dianalisis berupa angka atau skor dan biasanya didapatkan dengan menggunakan sebuah alat pengumpul data yang jawabannya merupakan rentang skor ataupun pertanyaan yang diberi bobot. Penelitian ini dapat dilakukan terhadap pengelola atau staff yang bertanggungjawab terhadap tugas tersebut.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh staff Kantor UPPD Kabupaten Pati. Di Kantor UPPD Kabupaten Pati terdapat 3 bagian. Antara lain yaitu Bagian Tata Usaha, Bagian Retribusi dan Pajak Daerah, dan Bagian Pajak Kendaraan Bermotor. Pertimbangan pemilihan Kantor UPPD Kabupaten Pati yaitu untuk meninjau dan mengetahui mengenai pengaruh sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan sistem informasi akuntansi

keuangan daerah dan *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik di kantor tersebut.

3.2.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh staff Kantor UPPD Kabupaten Pati. Di Kantor UPPD Kabupaten Pati terdapat 3 bagian. Antara lain yaitu Bagian Tata Usaha, Bagian Retribusi dan Pajak Daerah, serta Bagian Pajak Kendaraan Bermotor dengan total sampel sebanyak 40 responden. Dasar pertimbangan adalah dikarenakan bagian – bagian tersebut merupakan penanggungjawab dari pengelolaan akuntansi sektor publik. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan sample jenuh. Dengan kriteria, staff atau pegawai yang perkerjaannya berkaitan langsung dengan pengelolaan akuntansi sektor publik.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer merupakan data yang diperoleh langsung. Data primer tersebut berupa data subjek yang diperoleh dari responden penelitian yang berupa informan dengan cara wawancara serta data dokumenter. Wawancara dilakukan kepada pihak pegawai terkait di lingkungan Kantor UPPD Kabupaten Pati yang memenuhi kriteria. Narasumber yang dipilih merupakan seseorang yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan suatu data yang diperlukan dalam hal pengelolaan akuntansi sektor publik.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey lapangan, dengan menyebarkan kuesioner kepada Staff Unit Pengelolaan Pajak Daerah di kantor UPPD Kabupaten Pati secara online maupun secara offline menggunakan *paper* dan *Google Form.* Pertanyaan terstruktur terdiri dari beberapa pertanyaan modifikasi dari Hudson et al. (2001) yang melakukan suatu pengukuran berdasarkan persepsi *modified likert-type*, dengan skala pengukuran 5 (1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju). Kuesioner tersebut ditujulan kepada kepala bagian dan staff yang berkaitan dengan pengelolaan akuntansi sektor publik.

Tabel 3.1 Modified likert-type

Jawaban	Nilai / skor
STS = Sangat Tidak Setuju	1
TS = Tidak Setuju	2
N = Netral	3
S = Setuju	4
SS = Sangat Setuju	5

3.5 Variable, Definisi Operasional, dan Indikator

3.5.1 Variable

1. Variable Dependen (Y)

Variable dependen (terikat) adalah suatu variable yang dipengaruhi oleh adanya variable bebas atau independen, besarnya tingkat perubahan pada variable dependen tergantung dari besaran variable independen. Variable dependen dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati.

2. **Variable Independen (X)**

Variable independen (bebas) merupakan suatu variable yang mempunyai kemampuan dalam hal mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variable dependen atau terikat. Variable independen dalam penelitian ini adalah Kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan SIAKD dan *Value For Money*.

3.5.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variable

3.5.2.1. Variable Dependen

Variable dependen (terikat) adalah suatu variable yang dipengaruhi oleh adanya variable bebas atau independen, besarnya tingkat perubahan pada variable dependen tergantung dari besaran variable independen. Variable dependen dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati.

Akuntansi sektor publik yaitu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga – lembaga publik sebagai salah satu sarana atau tempat pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kuisoner yang digunakan mengacu pada (Fedrianawati, 2017) dengan dimodifikasi.

3.5.2.2. Variable Independen

Variable Independen (bebas) yaitu variable yang mana memiliki kemampuan mempengaruhi. Variable independen dalam penelitian ini adalah Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas, Pemanfaatan SIAKD, dan *Value For Money*.

1. Kejelasan Sasaran Anggaran adalah tujuan agar seluruh anggaran yang ditetapkan secara jelas dan detail dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas semua pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran digunakan untuk mengukur seberapa jelas dan spesifik tujuan anggaran ditetapkan agar dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kuisoner yang digunakan mengacu pada (Siti Hartini Amalia, 2019) dengan dimodifikasi
2. Akuntabilitas adalah suatu bentuk dari kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) ataupun suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dengan bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Kuisoner yang digunakan mengacu pada (Ardita, 2017)
3. Pemanfaatan SIAKD adalah sebuah penerapan sistem informasi akuntansi oleh organisasi sektor publik atau lembaga pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan suatu teknologi

dari sistem informasi dapat diukur dari beberapa faktor berikut ini :

a. Penggunaan teknologi dapat menambah produktivitas dari penggunanya
b. Penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja pengguna
c. Penggunaan teknologi membantu dalam efisiensi proses yang harus dilakukan oleh penggunanya

Kuisoner yang digunakan mengacu pada (Neni et al., 2021) yang dimodifikasi.

4. *Value For Money* adalah suatu proses untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun konsep *value for money* sebagai berikut:

   a. Ekonomi berkaitan dengan hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Pengertian ekonomi sering disebut kehematan yang mencakup mengenai pengelolaan secara hati – hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

b. Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi, pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua –duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*).

c. Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Kuisoner yang digunakan mengacu pada (Indrawan, 2021)

Berdasarkan uraian diatas maka indikator dari variabel tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.2 Indikator Variabel

No.	Variabel	Indikator	Kuesioner	Sumber
1	Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik	1. Standart akuntansi keuangan sektor publik 2. Sistem akuntansi keuangan sektor publik	No. 1 dan 2 No. 3, 4 dan 5	(Fedrianawati, 2017)
2	Kejelasan Sasaran Anggaran	1. Sasaran anggaran secara prioritas 2. Standart sasaran anggaran 3. Kinerja anggaran	No. 6 dan 7 No. 8 No. 9 dan 10	(Siti Hartini Amalia, 2019)
3	Akuntabilitas	1. Akuntabilitas kejujuran 2. Akuntabilitas kebijakan 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas hukum 5. Akuntabilitas finansial	No. 11 No. 12 No. 13 No. 14 No. 15	(Ardita, 2017)
4	Pemanfaatan SIAKD	1. SIA memenuhi prinsip kecepatan dan mampu menyediakan informasi secara tepat waktu 2. SIA dapat dipahami dan mudah digunakan oleh setiap pengguna yang berkepentingan 3. SIA dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan internet 4. SIA menghasilkan informasi yang lebih berkualitas, bernilai dansesuai dengan kebutuhan pengguna informasi	No. 16 No. 17 dan 18 No. 19 No. 20	(Neni et al., 2021)
5	*Value For Money*	1. Efisien dalam pengelolaan anggaran 2. Efektifitas dalam melaksanakan program kerja 3. Ekonomis dalam mengelola prosedur administrasi	No. 21, 22 dan 23 No. 24 No. 25	(Indrawan, 2021)

3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan uji kualitas data dan diolah menggunakan SPSS.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk mengetahui gambaran yang ada dalam suatu variable penelitian meliputi median, mean, modus, standard deviasi, minimum, dan maksimum. Analisis statistik deskriptif merupakan suatu hal yang sangat penting didalam penelitian dikarenakan berisi mengenai data – data numerik sehingga penyajiannya dapat menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas merupakan uji yang berfungsi untuk menunjukkan kecermatan alat dalam mengukur dengan kata lain dapat digunakan untuk menguji valid atau tidaknya pernyataan pernyataan yang sudah dikumpulkan serta digunakan dalam pengukuran suatu variable. Uji ini menggunakan *pearson correlation* dengan cara menghitung korelasi dari setiap pertanyaan. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan r tabel dengan r hitung, jika r hitung > r tabel maka instrument dikatakan valid, begitu pula sebaliknya jika r hitung < r tabel maka instrument dikatakan tidak valid.

3.6.2.2. Hasil Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sebuah uji yang mempunyai fungsi untuk mengukur kestabilan antara hasil pengamatan yang dilakukan dalam kuesioner pada waktu yang berbeda. Tolak ukualam uji reliabilitas menggunakan sebuah metode yaitu *Cronbach Alpha*. Yang menyimpulkan hasil, jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,06 maka variable tersebut dapat dinyatakan reliable.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan, variabel residual atau pengganggu terdistribusi secara normal atau tidak. Data yang normal merupakan data yang penyebarannya merata dengan pola yang rata pula dengan arti tidak berat sebelah atau kurva normal.

3.6.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Menurut (Ghozali & Imam, 2018) model regresi yang baik adalah didalamnya tidak terjadi korelasi antara variable independen. Untuk menguji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jikalau hasil dari VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas dan sebaliknya

jikalau hasil dari VIF lebih dari 10 maka terdapat multikolinearitas didalamnya.

3.6.3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas mempunyai fungsi untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual anatara satu pengamat dengan pengamat yang lain (Kadek Sri Dewi Asih et al., 2021) Model regresi yang baik yaitu jika tidak terjadi heterokedastisitas atau disebut homoskedastisitas, untuk mengujinya yaitu menggunakan uji glesjer. Jika signifikansinya > 0,05 maka model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Kania, 2019) regresi linear berganda ialah suatu model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Model persamaan dalam penilitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2 + \beta 3\ X3 + \beta 4\ X4 + e$$

Keterangan :

Y : Pengelolaan akuntansi sektor publik

α : Konstanta

β1 : Koefisien kejelasan sasaran anggaran2z

β2 : Koefisien akuntabilitas

β3 : Koefisien pemanfaatan SIAKD

β4 : Koefisien *value for money*

X1 : Kejelasan sasaran anggaran

X2 : Akuntabilitas

X3 : Pemanfaatan SIAKD

X4 : *Value for money*

e : Error

3.6.5 Uji Kebaikan Model

3.6.5.1. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variable independen dalam model regresi memiliki pengaruh secara simultan terhadap variable dependen. Uji pengaruh simultan (Uji F) dikenal dengan Uji serentak atau Uji Model / Uji Anova. Uji signifikansi simultan dapat dilihat hasil uji dengan melalui pengamatan nilai signifikan F pada tingkat α yang digunakan (α = 0,05). Jika P Value < 0,05 maka hipotesis diterima begitu juga sebaliknya , jika P > 0,05 maka hipotesis ditolak.

3.6.5.2. Uji Koefisien Determinasi (*Adjust R Square*)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh dari variable independen terhadap variable dependen. Nilai *Adjust* R^2 yaitu antara nol dan satu, nilai yang kecil mempunyai arti bahwa kemampuan suatu variable independen

dalam menjelaskan variasi dependen sangatlah terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu mempunyai arti variable independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen (Ghozali & Imam, 2018).

3.6.6 Pengujian Hipotesis

3.6.6.1. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variable independen secara individu terhadap variable dependen. Langkah – langkah dalam pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Hipotesis
   a. H_0 : $\beta_1 \leq 0$, artinya kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik

      H_a : $\beta_1 > 0$, artinya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik
   b. H_0 : $\beta_2 \leq 0$, artinya akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik

      H_a : $\beta_2 > 0$, artinya akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik
   c. H_0 : $\beta_3 \leq 0$, artinya pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik

H_a : $\beta_3 > 0$, artinya pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik

d. H_0 : $\beta_4 \leq 0$, artinya *value for money* tidak berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik

H_a : $\beta_4 > 0$, artinya *value for money* berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik

2. Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 0,05
3. Menentukan kriteria penerimaan / penolakan H_0. Jika signifikansi < 0,05 maka H_0 ditolak atau H_a diterima, jika nilai signifikansi > 0,05 maka H_0 diterima atau H_a ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Sampel yang digunakan ialah seluruh staff / pegawai Kantor UPPD Kabupaten Pati. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara menyebarkan secara langsung dengan mendatangai kantor UPPD Kabupaten Pati. Penyebaran kuesioner dilakukan selama 3 hari dimulai pada tanggal 21 Desember 2021sampai dengan tanggal 23 Desember 2021. Berikut ini rincian data penyebaran kuesioner yang telah diperoleh :

Tabel 4.1 Sampel Penelitian

Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang didistribusikan	40
Kuesioner yang kembali	37
Kuesioner yang tidak kembali	3
Kuesioner yang tidak dapat diolah	-
Kuesioner yang dapat diolah	37
Response Rate	92,5%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kuesioner telah didistribusikan sebanyak 40 kuesioner dan kuesioner yang kembali adalah 37 responden serta kuesioner yang tidak kembali yaitu sebanyak 3 responden. Sedangkan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 37 responden dan bisa dikatakan bahwa kuesioner yang kembali dapat diolah semua.

4.2. Identitas Responden

4.2.1. Identitas responden berdasarkan lama bekerja

Gambaran umum yang diperoleh mengenai responden berdasarkan lama bekerja adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah	Presentase
< 1 Tahun - 3 tahun	13	35%
> 3 tahun - 5 tahun	15	41%
lebih dari 5 tahun	9	24%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Hasil yang diperoleh dari tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang telah bekerja selama kurang dari 1 tahun – 2 tahun sebanyak 13 responden dengan presentase 35%. Jumlah responden dengan lama bekerja kurang dari 3 tahun – 5 tahun yaitu sebanyak 15 responden dengan presentase sebesar 41%. Sedangkan responden dengan lama bekerja lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 9 responden dengan presentase sebesar 24%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden dengan lama bekerja kurang dari 3 tahun – 5 tahun lebih banyak daripada responden dengan lama bekerja yang lainnya.

4.2.2. Identitas responden berdasarkan pendidikan tingkat terakhir

Gambaran umum yang diperoleh mengenai responden berdasarkan pendidikan tingkat terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SMA	5	14%
D3	14	38%
S1	15	41%
S2	3	8%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berpendidikan SMA berjumlah 5 responden dengan presentase sebesar 14%. Responden dengan pendidikan terakhir Diploma (D3) berjumlah 14 dengan presentase sebesar 38%. Dan responden yang berpendidikan Sarjana (S1) berjumlah 15 dengan presentase sebesar 41%. Serta responden dengan pendidikan Magister (S2) berjumlah 3 responden dengan presentase sebesar 8%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa responden dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1) lebih dominan daripada yang lainnya.

4.2.3. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin

Gambaran umum yang diperoleh mengenai responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki – Laki	20	54%
Perempuan	17	46%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.4 responden laki – laki berjumlah 20 responden dengan presentase sebesar 54%. Dan responden perempuan berjumlah 17

dengan presentase sebesar 46%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa responden laki – laki lebih banyak daripada responden perempuan.

4.2.4. Identitas responden berdasarkan umur

Gambaran yang diperoleh mengenai responden berdasarkan umur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Umur Pegawai

Umur Pegawai	Jumlah	Presentase
20 tahun - 25 tahun	5	14%
> 25 tahun - 30 tahun	12	32%
> 30 tahun - 50 tahun	18	49%
>50 tahun	2	5%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang rentang umurnya 20 tahun – 25 tahun berjumlah 5 responden dengan presentase sebesar 14%. Responden dengan rentang umur >25 tahun – 30 tahun berjumlah 12 dengan presentase sebesar 32%. Dan responden yang rentang umurnya >30 tahun – 50 tahun berjumlah 18 dengan presentase sebesar 49%. Serta responden dengan rentang umur diatas 50 tahun berjumlah 2 responden dengan presentase sebesar 5%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa responden dengan rentang umur >30 tahun – 50 tahun lebih dominan daripada yang lainnya.

4.3. Teknik Analisis

4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mempunyai fungsi untuk melakukan perhitungan distribusi statistik kemudian digambarkan dan di interpretasikan dalam bentuk skor. Pada penelitian ini terdapat 25 pertanyaan yang mana pertanyaan – pertanyaan tersebut terbagi dengan jumlah yang sama setiap variabelnya yaitu berjumlah lima butir setiap variabel.

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisi mengenai pernyataan – pernyataan dalam bentuk skala *likert* untuk setiap pernyataan variabel dependen dan variabel independen. Pernyataan – pernyataan tersebut berhubungan dengan variabel pengelolaan akuntansi sektor publik, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan SIAKD dan *value for money*.

Tabel 4.6 Deskripsi variabel

Variabel	*N*	Min	Max	Mean	*Std. Deviation*
Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik	37	15	25	20,24	1,584
Kejelasan Sasaran Anggaran	37	17	25	20,97	1,619
Akuntabilitas	37	15	22	19,00	2,013
Pemanfaatan SIAKD	37	15	22	20,30	1,753
Value For Money	37	16	24	20,41	1,365

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Dari hasil tabel 4.6 dapat dijelaskan secara detail pada setiap variabel sebagai berikut :

Variabel pengelolaan akuntansi sektor publik terdiri dari lima butir pertanyaan dengan skala likert 1-5. Pada variabel pengelolaan akuntansi

sektor publik mempunyai nilai minimum 15 serta nilai maksimum sebesar 25. Sedangkan untuk nilai mean yaitu sebesar 20,24 dengan standar deviasi sebesar 1,584.

Variabel kejelasan sasaran anggaran terdiri dari lima butir pertanyaan dengan skala likert 1-5. Pada variabel kejelasan sasaran anggaran mempunyai nilai minimum 17 serta nilai maksimum sebesar 25. Sedangkan untuk nilai mean yaitu sebesar 20,97 dengan standar deviasi sebesar 1,619.

Variabel pemanfaatan SIAKD terdiri dari lima butir pertanyaan dengan skala likert 1-5. Pada variabel pemanfaatan SIAKD mempunyai nilai minimum 15 serta nilai maksimum sebesar 22. Sedangkan untuk nilai mean yaitu sebesar 19,00 dengan standar deviasi sebesar 2,013.

Variabel value for money terdiri dari lima butir pertanyaan dengan skala likert 1-5. Pada variabel value for money mempunyai nilai minimum 16 serta nilai maksimum sebesar 24. Sedangkan untuk nilai mean yaitu sebesar 20, 41 dengan standar deviasi sebesar 1,365.

4.3.2. Analisis Deskripsi Responden

Analisis ini ditujukan untuk mengetahui suatu tingkatan di setiap pertanyaan responden terhadap variabel penelitian. Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui kategori dari suatu pernyataan yang diberikan oleh responden termasuk dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, ataupun sangat tinggi. Selain itu, dapat digunakan untuk

menganalisis suatu indeks yang digunakan untuk menggambarkan persepsi responden pada setiap butir pertanyaan yang telah diajukan dalam kuesioner, indeks persepsi responden ditentukan dalam skala *likert* 1-5.

Berdasarkan dari pengelompokan kategori interval, penelitian dapat menentukan indeks persepsi pada setiap responden terhadap suatu variabel penelitian sebagai berikut :

4.3.2.1. Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik

Variabel pengelolaan akuntansi sektor publik mempunyai 5 butir pertanyaan berikut ini adalah hasil responsi responden terhadap pertanyaan mengenai pengelolaan akuntansi sektor publik :

Tabel 4.7 Deskripsi variabel pengelolaan akuntansi sektor publik

Item	Skala Penelitian											
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Y1.1	0	0%	0	0%	1	3%	32	86%	4	11%	37	100%
Y1.2	0	0%	0	0%	1	3%	32	86%	4	11%	37	100%
Y1.3	0	0%	1	3%	2	5%	25	68%	9	24%	37	100%
Y1.4	0	0%	0	0%	9	24%	24	65%	4	11%	37	100%
Y1.5	0	0%	0	0%	4	11%	27	73%	6	16%	37	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Hasil pada tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai distribusi frekuensi pada variabel Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik paling banyak pada poin Y1.1 dan Y1.2 yaitu masing-masing sebanyak 32 responden berpendapat setuju.

4.3.2.2. Kejelasan Sasaran Anggaran

Variabel kejelasan sasaran anggaran mempunyai 5 butir pertanyaan berikut ini adalah hasil responsi responden terhadap pertanyaan mengenai kejelasan sasaran anggaran :

Tabel 4.8 Deskripsi variabel kejelasan sasaran anggaran

Item	Skala Penelitian											
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X1.1	0	0%	0	0%	1	3%	20	54%	16	43%	37	100%
X1.2	0	0%	0	0%	4	11%	28	76%	5	14%	37	100%
X1.3	0	0%	0	0%	1	3%	20	54%	16	43%	37	100%
X1.4	0	0%	0	0%	8	22%	24	65%	5	14%	37	100%
X1.5	0	0%	0	0%	0	0%	29	78%	8	22%	37	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Hasil pada tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai distribusi frekuensi pada variabel kejelasan sasaran anggaran paling banyak pada poin X1.5 yaitu sebanyak 29 responden berpendapat setuju dan menunjukkan bahwa responden berpendapat kejelasan sasaran anggaran dapat membantu dalam pengelolaan akuntansi sekto publik.

4.3.2.3. Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas mempunyai 5 butir pertanyaan berikut ini adalah hasil responsi responden terhadap pertanyaan mengenai akuntabilitas :

Tabel 4.9 Deskripsi variabel akuntabilitas

Item	Skala Penelitian											
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X2.1	1	3%	0	0%	9	24%	24	65%	3	8%	37	100%
X2.2	0	0%	1	3%	7	19%	27	73%	2	5%	37	100%
X2.3	0	0%	1	3%	0	0%	26	70%	10	27%	37	100%
X2.4	0	0%	9	24%	5	14%	18	49%	5	14%	37	100%
X2.5	0	0%	6	16%	5	14%	20	54%	6	16%	37	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Hasil pada tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai distribusi frekuensi pada variabel akuntabilitas paling banyak pada poin X2.2 yaitu sebanyak 29 responden berpendapat setuju dan menunjukkan bahwa responden berpendapat akuntabilitas dapat membantu dalam pengelolaan akuntansi sekto publik.

4.3.2.4. Pemanfaatan SIAKD

Variabel pemanfaatan SIAKD mempunyai 5 butir pertanyaan berikut ini adalah hasil responsi responden terhadap pertanyaan mengenai pemanfaatan SIAKD :

Tabel 4.10 Deskripsi variabel pemanfaatan SIAKD

Item	Skala Penelitian											
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X3.1	0	0%	0	0%	2	5%	22	59%	13	35%	37	100%

X3.2	0	0%	1	3%	3	8%	30	81%	3	8%	37	100%
X3.3	0	0%	0	0%	6	16%	29	78%	2	5%	37	100%
X3.4	0	0%	1	3%	5	14%	28	76%	3	8%	37	100%
X3.5	0	0%	0	0%	1	3%	25	68%	11	30%	37	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Hasil pada tabel 4.10 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai distribusi frekuensi pada variabel pemanfaatan SIAKD paling banyak pada poin X3.2 yaitu sebanyak 30 responden berpendapat setuju dan menunjukkan bahwa responden berpendapat pemanfaatan SIAKD dapat membantu dalam pengelolaan akuntansi sekto publik.

4.3.2.5. Value For Money

Variabel *value for money* mempunyai 5 butir pertanyaan berikut ini adalah hasil responsi responden terhadap pertanyaan mengenai *value for money* :

Tabel 4.11 Deskripsi variabel *value for money*

Item	**Skala Penelitian**											
	STS (1)		**TS (2)**		**N (3)**		**S (4)**		**SS (5)**		**Jumlah**	
	F	**%**	**F**	**%**	**F**	**%**	**F**	**%**	**F**	**%**	**F**	**%**
X4.1	0	0%	0	0%	1	3%	31	84%	5	14%	37	100%
X4.2	0	0%	0	0%	1	3%	29	78%	7	19%	37	100%
X4.3	0	0%	1	3%	2	5%	30	81%	4	11%	37	100%
X4.4	0	0%	0	0%	4	11%	26	70%	7	19%	37	100%
X4.5	0	0%	0	0%	4	11%	27	73%	6	16%	37	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Hasil pada tabel 4.11 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai distribusi frekuensi pada variabel *value for money* paling banyak pada poin X4.1 yaitu sebanyak 31 responden berpendapat setuju dan menunjukkan bahwa responden berpendapat *value for money* dapat membantu dalam pengelolaan akuntansi sekto publik.

4.3.3. Uji Kualitas Data

4.3.3.1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menunjuk suatu keputusan serta kecermatan alat dalam mengukur. Uji validitas juga berfungsi untuk menguji valid atau tidaknya suatu pertanyaan – pertanyaan yang telah dikumpulkan serta digunakan dalam pengukuran terhadap variabel yang di teliti.

Berikut merupakan tabel hasil uji validitas dengan menggunakan program SPSS versi 24 :

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas

VARIABEL		ITEM	R HITUNG	R TABEL	KETERANGAN
Y1	Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik	1	0,632	0,316	Valid
		2	0,632		Valid
		3	0,488		Valid
		4	0,666		Valid
		5	0,657		Valid
X1	Kejelasan Sasaran Anggaran	1	0,781	0,316	Valid
		2	0,611		Valid
		3	0,504		Valid
		4	0,595		Valid
		5	0,658		Valid
X2	Akuntabilitas	1	0,414	0,316	Valid

		2	0,717		Valid
		3	0,350		Valid
		4	0,830		Valid
		5	0,739		Valid
X3	Pemanfaatan SIAKD	1	0,814	0,316	Valid
		2	0,674		Valid
		3	0,688		Valid
		4	0,777		Valid
		5	0,401		Valid
X4	*Value For Money*	1	0,700	0,316	Valid
		2	0,480		Valid
		3	0,686		Valid
		4	0,653		Valid
		5	0,812		Valid

Sumber : Data primer yang diolah SPSS ver 24, 2021

Hasil pada tabel 4.12 diatas dapat disimpulkan bahwa dari uji validitas terhadap semua indikator valid yang artinya kuesioner tersebut dapat memberikan hasil ukur yang tepat serta akurat sesuai dengan apa yang telah dimaksudkan dalam penelitian ini.

4.3.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mencari kestabilan antara hasil pengamatan yang telah dilakukan. Dalam uji reliabilitas menggunakan metode tolak ukur *Cronbach Alpha* yang dimana bila nilai yang muncul > 0,06 maka variabel tersebut dinyatakan reliable dan jika nilai yang muncul <0,06 dinyatakan tidak reliable.

Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas

VARIABEL	*CRONBACH'S ALPHA*	KETERANGAN
Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik	0,537	Reliable
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,608	Reliable
Akuntabilitas	0,319	Reliable
Pemanfaatan SIAKD	0,700	Reliable

Value For Money	0,466	Reliable

Sumber : Data primer yang diolah SPSS ver 24, 2021

Hasil yang terdapat pada tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel mempunyai nilai *Cronbach Alpha* > 0,06 yang dimana variabel pengelolaan akuntansi sektor publik memiliki *Cronbach Alpha* 0,537 > 0,06. Sedangkan variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki *Cronbach Alpha* 0,608 > 0,06. Variabel akuntabilitas mempunyai *Cronbach Alpha* 0,319 > 0,06. Variabel pemanfaatan SIAKD mempunyai *Cronbach Alpha* 0,700 > 0,06. Serta variabel *value for money* memiliki *Cronbach Alpha* 0,466 > 0,06. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dalam menggambarkan setiap variabelnya adalah reliable atau handal. Data yang handal dapat diperoleh dari jawaban responden yang dilakukan secara konsisten.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data berfungsi untuk menguji apakah model regresi yang digunakan, variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal atau tidak normal. Sedangkan model regresi yang bisa dikatakan baik didalam suatu penelitian mempunyai nilai distribusi normal atau mendekati normal. Dalam uji normalitas data ini menggunakan uji statistik *non parametric Kolmogorov Smirnov*, data dapat dikatakan normal jikalau nilai signifikan > 0,05. Variabel yang akan diujikan dalam

penelitian ini adalah variabel dependen yaitu pengelolaan akuntansi sektor publik, dan variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan SIAKD serta *value for money*. Data diolah menggunakan SPSS versi 24. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* :

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Data (*Kolmogorov Smirnov*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		37
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.114131
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.087
Test Statistic		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data primer yang diolah SPSS ver 24, 2021

Dari hasil gambar 4.1 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,200 > 0,05. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa data terdistibusi dengan normal. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa kuesioner penelitian ini telah lolos uji normalitas data sehingga data yang ada dapat untuk digunakan lebih lanjut. Selain dari penjelasan tersebut, bisa juga dilihat dengan meggunakan grafik p-plot. Dibawah ini merupakan hasil uji normalitas data menggunakan grafik p-plot :

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Probability Plot

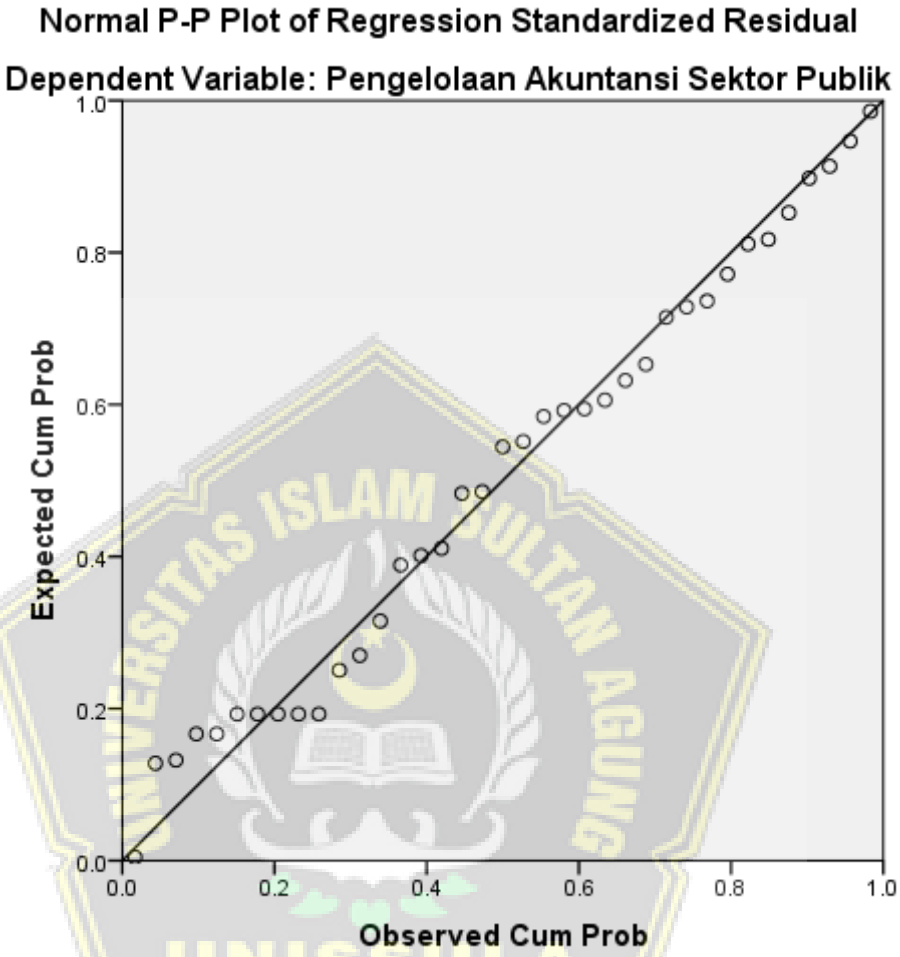

Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa grafik p-plot pada data menyebar di sekitar garis ataupun di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah dari garis tersebut. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa data terdistribusi normal serta layak untuk digunakan dalam sebuah penelitian.

4.4.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel independen. Jikalau nilai toleransi > 0,1 maka tidak terjadi korelasi antar variabel independen dan jikalau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,340	2,938
Akuntabilitas	0,869	1,151
Pemanfaatan SIAKD	0,503	1,990
Value For Money	0,402	2,489

Sumber : Data primer yang diolah SPSS ver 24, 2021

Dari hasil tabel diatas maka memperoleh hasil bahwa pada variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai tolerance 0,340 > 0,1 dan memiliki nilai VIF 2,938 < 10. Variabel akuntabilitas mempunyai nilai tolerance 0,869 > 0,1 dan mempunyai nilai VIF 1,151 < 10. Variabel pemanfaatan SIAKD memiliki nilai tolerance 0,503 > 0,1 dan nilai VIF 1,990 < 10. Serta variabel *value for money* mempunyai nilai tolerance sebesar 0,402 > 0,1 dan nilai VIF 2,489 < 10. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut tidak terjadi korelasi dan juga tidak terdapat adanya multikolinieritas.

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertfungsi untuk mengetahui apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variance residual dari setiap pengematan yang dilakukan. Model regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas atau juga yang disebut homoskedastisitas. Penelitian

ini menggunakan uji glejser, jikalau nilai signifika > 0,05 maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,271
Akuntabilitas	0,131
Pemanfaatan SIAKD	0,734
Value For Money	0,173

Sumber : Data primer yang diolah SPSS ver 24, 2021

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikasi yang diperoleh setiap variabel lebih dari 0,05. Dengan perolehan setiap variabelnya yaitu untuk variabel kejelasan sasaran anggaran nilai signifikansinya yaitu 0,271 > 0,05. Variabel akuntanbailitas nilai signifikansinya yaitu 0,131 > 0,05. Variabel pemanfaatan SIAKD nilai signifikansinya yaitu 0,734 > 0,05 serta variabel *value for money* nilai signifikansinya yaitu 0,173 > 0,05. Dari perolehan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat adanya heterokedastisitas. Selain dari penjelasan tabel diatas dapa dilihat dengan grafik *scatterplot*. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* :

Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Grafik Scatterplot)

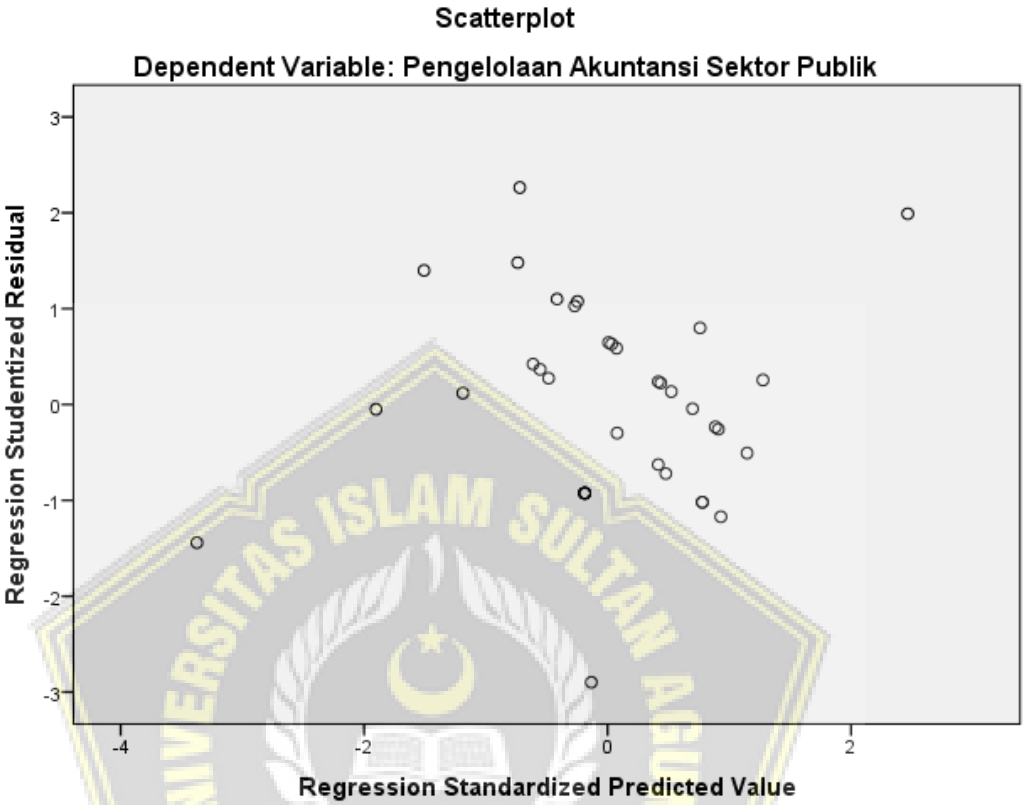

Sumber : Data primer yang diolah SPSS ver 24, 2021

Dari hasil gambar 4.3 tersebut dapat menunjukkan bahwa titik – titik menyebar secara acak dan merata di sekitar garis 0 serta tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas pada model regresi ini.

4.5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda ialah suatu model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan sistem

informasi akuntansi keuangan daerah dan *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Berikut ini merupakan hasil analisis regresi linear berganda :

Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]			
Model	**Unstandardized Coefficients**		**Standardized Coefficients**
	B	**Std. Error**	**Beta**
(Constant)	2,352	2,005	
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,569	0,136	0,582
Akuntabilitas	0,269	0,099	0,342
Pemanfaatan SIAKD	0,340	0,125	0,376
Value For Money	0,640	0,147	0,552

Sumber : Data primer yang diolah SPSS ver 24, 2021

$Y : 2,352 + 0,569\ X_1 + 0,269\ X_2 + 0,376\ X_3 + 0,640\ X_4 + e$

Keterangan :

X1 : Kejelasan sasaran anggaran

X2 : Akuntabilitas

X3 : Pemanfaatan SIAKD

X4 : *Value for money*

Dari persamaan regresi yang ada diatas dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Nilai konstanta yaitu sebesar 2,352 yang merupakan nilai positif, maka dari itu dapat diartikan bahwa jikalau kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan SIAKD dan *value for money* maka pengelolaan akuntansi sektor publik bernilai positif.
2. Nilai koefisien kejelasan sasaran anggaran yaitu sebesar 0,569 bernilai positif, yang mempunyai arti bahwa jika kejelasan sasaran anggaran

(X1) naik satu satuan maka berpengaruh pada kenaikan nilai pengelolaan akuntansi sektor publik (Y) dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

3. Nilai koefisien akuntabilitas yaitu sebesar 0,269 bernilai positif, yang mempunyai arti bahwa jika akuntabilitas (X2) naik satu satuan maka akan berpengaruh terhadap kenaikan nilai pengelolaan akuntansi sektor publik (Y) dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
4. Nilai koefisien pemanfaatan SIAKD yaitu sebesar 0,340 bernilai positif, yang mempunyai arti bahwa jika pemanfaatan SIAKD (X3) naik satu satuan maka berpengaruh dalam kenaikan nilai pengelolaan akuntansi sektor publik (Y) dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
5. Nilai koefisien value for money yaitu sebesar 0,640 bernilai positif, yang mempunyai arti bahwa jikalau value for money (X4) naik satu satuan maka akan berpengaruh terhadap kenaikan nilai pengelolaan akuntansi sektor publik (Y) dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

4.6 Uji Kebaikan Model

4.6.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F merupakan uji yang menunjukkan apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan dalam suatu penelitian, tingkat

signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,05. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut :

- H_a : Apabila sig. $\alpha < 0,05$ maka variabel independen secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- H_0 : Apabila sig. $\alpha > 0,05$ maka variabel independen secara bersamaan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.17 Hasil Uji Statistik F

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	48,124	4	12,031	8,615	0,000[b]
	Residual	44,686	32	1,396		
	Total	92,811	36			

Sumber : Data primer yang diolah SPSS ver 24, 2021

Hasil yang diperoleh dari tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,000 < 0,05 maka dari itu H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan SIAKD, value for money berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan akuntansi sektor publik.

4.6.2. Uji Koefisien Determinasi (*Adjust R Square*)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 yaitu antara nol sampai dengan satu. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari koefisien determinasi dengan SPSS versi 24 :

Tabel 4.18 Hasil Koefisien Determinasi (Adjust R^2)

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
1	0,720[a]	0,519	0,458	1,182
a. Predictors : (Constant), X4, X2, X3, X1				
b. Dependent Variable : Y1				

Sumber : Data primer yang diolah SPSS ver 24, 2021

Hasil yang diperoleh dari perhitungan pada tabel hasil diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*Adjust* R^2) adalah sebesar 0,458 atau 45,8%. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan akuntansi sektor publik dapat dijelaskan sebesar 45,8% oleh variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan SIAKD dan *value for money*. Sedangkan 54,2% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang belum dilakukan pada penelitian ini.

4.7. Pengujian Hipotesis

4.7.1. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui suatu pengaruh variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel

independennya konstan. Berikut merupakan hasil dari Uji t pada penenlitian ini :

Tabel 4.19 Hasil Uji Statistik t

Model		B	Sig.	Hasil	Keterangan
1	(Constant)	0,513	0,885		
	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,569	0,000	Positif Signifikan	Hipotesis diterima
	Akuntabilitas	0,269	0,011	Positif signifikan	Hipotesis diterima
	Pemanfaatan SIAKD	0,340	0,010	Positif Signifikan	Hipotesis diterima
	Value For Money	0,640	0,000	Positif signifikan	Hipotesis diterima

Sumber : Data primer yang diolah SPSS ver 24, 2021

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan sebagai berikut :

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik Berdasarkan pada hasil uji t, koefisien regresinya sebesar 0,569 dengan arah positif dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu hipotesis yang mengatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik diterima.

Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Berdasarkan pada hasil uji t, koefisien regresinya sebesar 0,269 dengan arah positif dan nilai signifikan sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu hipotesis yang mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik diterima.

Pengaruh pemanfaatan SIAKD terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Berdasarkan pada hasil uji t, koefisien regresinya sebesar

0,340 dengan arah positif dan nilai signifikan sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu hipotesis yang mengatakan bahwa pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik diterima.

Pengaruh *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Berdasarkan pada hasil uji t, koefisien regresinya sebesar 0,640 dengan arah positif dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu hipotesis yang mengatakan bahwa *value for money* berpengaruh positif terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik diterima.

4.8. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, pemanfaatan SIAKD dan *value for money* terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan akuntansi sektor publik. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil uji hipotesis diatas :

4.8.1. Pengaruh Analisis Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Dari hasil pengujian statistik t (uji t) yang telah dilakukan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya semakin jelas sasaran anggaran akan

meningkatkan pengelolaan akuntansi sektor publik. Koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya kejelasan sasaran anggaran, maka akan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pengelolaan akuntansi sektor publik.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan tujuan agar seluruh anggaran yang ditetapkan secara jelas dan detail dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas semua pencapaian sasaran anggaran tersebut. Organisasi memerlukan anggaran untuk merancang strategi dalam melakukan perencanaan baik sasaran jangka pendek maupun jangka panjang.

4.8.2. Pengaruh Analisis Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik

Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Dari hasil pengujian statistik t (uji t) yang telah dilakukan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,011 < 0,05 yang artinya semakin mengalami kenaikan ataupun penurunan akan berpengaruh pada pengelolaan akuntansi sektor publik. Koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas, maka peluang pengelolaan akuntansi sektor publik semakin tinggi pula.

Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban baik individu maupun organisasi dalam mengelola sumber daya yang sudah diberikan guna pencapaian target melalui laporan keuangan dan kinerja

secara periodik. Akuntabilitas meliputi suatu eksitensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terkait aksi yang dilakukannya dalam menggunakan sumber – sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitasnya sebuah kegiatan dalam pencapian dari sasaran suatu program yang sedang dijalankan.

4.8.3. Pengaruh Analisis Pemanfaatan SIAKD terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik

Pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Dari hasil pengujian statistik t (uji t) yang telah dilakukan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,010 > 0,05 yang artinya apabila terjadi peningkatan dalam pemanfaatan SIAKD maka akan mejadikan pengelolaan akuntansi sektor publik yang semakin baik. koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemanfaatan SIAKD, maka akan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pengelolaan akuntansi sektor publik.

Laporan Keuangan dikatakan baik dan juga berkualitas ketika mampu memberikan informasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan untuk mengambil keputusan oleh pemangku kepentingan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kemampun dalam memberikan informasi yang memenuhi kebutuhan pemakai didalam mengambil suatu keputusan serta dapat dipahami.

4.8.4. Pengaruh Analisis *Value For Money* terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik

Value for money berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Dari hasil pengujian statistik t (uji t) yang telah dilakukan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,000 > 0,05 yang artinya apabila semakin baiknya penggunaan *value for money* akan berpengaruh pada peningkatan dalam pengelolaan akuntansi sektor publik. koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya *value for money*, maka akan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pengelolaan akuntansi sektor publik.

Inti dari sebuah pengukuran kinerja *value for money* dalam suatu pengelolaan akuntansi sektor publik yaitu kinerja dari pemerintah tidak dapat dinilai dalam output yang dihasilkan tetapi dapat dilihat secara terintegrasi dalam mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian yang sudah dilakukan mengenai "Analisis Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas, Pemanfaatan SIAKD dan Value For Money Terhadap Pengelolaan Akuntansi Sektor Publik Kantor UPPD Kabupaten Pati" maka dari itu dapat diambil kesimpulan antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Kejelasan sasaran anggaran terbukti berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Dengan itu dapat diambil kesimpulan bahwa semakin adanya kejelasan sasaran anggaran akan mempengaruhi tingkat pengelolaan akuntansi sektor publik kantor UPPD Kabupaten Pati. Hal ini juga dapat dilihat dari lama bekerja responden dengan rata-rata lebih dari 3 tahun sudah sebanyak 65% yang artinya para responden sudah bekerja bertahun – tahun dan mengetahui bagaimana dalam pengalokasian anggaran di kantor tersebut.
2. Akuntabilitas terbukti berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tingginya suatu akuntabilitas akan meningkatkan pengelolaan akuntansi sektor publik kantor UPPD Kabupaten Pati. Di tabel deskriptif dijelaskan bahwa usia pegawai paling banyak yaitu di kisaran usia lebih dari 30 tahun – 50 tahun sebanyak 49%, bisa

dikatakan bahwa pegawai kantor rata – rata berusia produktif dan sudah memasuki usia dewasa dimana dalam kinerjanya cenderung lebih profesional dibandingkan usia dibawahnya.

3. Pemanfaatan SIAKD terbukti berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Dengan itu dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tingginya pemanfaatan SIAKD diterapkan maka akan memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan dalam pengelolaan akuntansi sektor publik kantor UPPD Kabupaten Pati. Tingkat pendidikan terakhir pegawai yang sudah menempuh D3, S1 ataupun S2 yaitu sebesar 86%. Presentase ini dapat disimpulkan bahwa pegawai UPPD Kabupaten Pati rata – rata sudah pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi maka bisa diartikan bahwa rata – rata pegawai telah paham dengan aturan dan juga telah memanfaatakan SIAKD dalam menjalankan pengelolaan akuntansi sektor publik tersebut.
4. *Value for money* terbukti berpengaruh terhadap pengelolaan akuntansi sektor publik. Dengan itu dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat *value for money* akan terjadi juga kenaikan dalam hal pengelolaan akuntansi sektor publik kantor UPPD Kabupaten Pati. Dengan tingkat lama bekerja, usia dan pendidikan terkahir para responden yang cukup tinggi, maka hal ini dapat mempengaruhi dalam kinerja dari responden dan juga tingkat profesionalitas responden.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian antara lain yaitu :

1. Kuisoner yang disebarkan oleh peneliti hanya kembali 37 dan 3 kuisoner lainnya tidak kembali dikarenakan ada pegawai yang sedang mengambil izin cuti.
2. Peneliti tidak mengetahui keseriusan responden dalam menjawab kuisoner.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan maka saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

5.3.1. Bagi Akademisi

a. Dari penelitian diatas, diketahui nilai *Adjust R Square* yaitu sedang dengan presentase sebesar 45,8% yang berarti masih ada 54,2% variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan akuntansi sektor publik. Maka dari itu, peneliti berikutnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian di lokasi yang berbeda ataupun di beberapa lokasi sehinggi dapat digunakan untuk menjadi referensi tambahan serta dapat menambahkan konstruksi ilmu dalam nilai – nilai islam terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian seperti pertanggungjawaban dan kejujuran.

b. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan akuntansi sektor publik.

5.3.2. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebaiknya meningkatkan kualitas pendidikan terakhir dari pegawai serta dapat memberikan seminar ataupun pelatihan. Dengan harapan agar setiap pegawai lebih maksimal dan profesional dalam bekerja.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hakim, Y. (2019). Penerapan Konsep Value For Money Dalam Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Implementation of the Value For Money Concept in Increasing Accountability, Transparency and Supervision toward Budget Performance. In *Universitas Mercu Buana Jakarta Tanjung Benoa-Bali* (Vol. 29).

Ardita, E. (2017). *PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN OGAN ILIR*. *148*, 148–162.

Candrakusuma, D. A. (UMY), & Jatmiko, B. (UMY). (2017). *DAMPAK KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL*. www.sragenkab.go.id

Defitri, S. Y. (2018). PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Benefita*, *3*(1). https://doi.org/10.22216/jbe.v2i3.2376

Fathia, N., Yusralaini, P. :, & Anggraini, L. (2017). TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) (Study Kasus SKPD di Provinsi Riau). In *JOM Fekon* (Vol. 4, Issue 1).

Fedrianawati, E. I. (2017). *"Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo.*

Fitria, I. (Universitas N. P. (2017). *PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP BUDGETARY SLACK*.

Harmain, H., Naser Daulay, A., Tamara Enre, D., & Medan Sumatra Utara Medan, U. (2020). Analysis Of Value For Money In Come … Ad-Deenar ANALYSIS OF VALUE FOR MONEY INCOME BUDGETS GOVERNMENT OF THE CITY OF MEDAN ANALISIS VALUE FOR MONEY ANGGARAN PENDAPATAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *4*(2). https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.752

Indrawan, I. P. A. (2021). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Kecamatan*

Buleleng). *148*, 148–162.

Isnanto, Y., Suharno, & Widarno, B. (2019). *PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH*.

Kadek Sri Dewi Asih, N., Putu Trisna Windika Pratiwi, N., Ekonomi, F., & dan Pariwisata, B. (2021). *PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA), SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA OPD KABUPATEN GIANYAR*.

Kania, Y. L. (2019). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN CITRA PERUSAHAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Survei Pada Konsumen Hotel Sukajadi Bandung)*. *53*(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id

Kartika, L., Dewi, U., Yuniarta, G. A., Aristia, M., Jurusan, P., & Program, A. (2017). *PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAPKEBERHASILAN PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL (STUDI EMPIRIS PADA SKPD KABUPATEN BADUNG)* (Vol. 8, Issue 2).

Nasution, D. A. D. (2018). *diANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH*.

Neni, L., Nurlela, Karlina, L., & Safitri, N. (2021). *ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DENGAN PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE*. *7*, 69–83.

Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *teori keagenan dan kejelasan sasaran anggaran*. 11–23.

Prawira, F. I. (2017). Faculty of Economics Riau University ,. *JOMFekom*, *4*(1), 843–857. https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf

Putra, G. (2017). *PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN, PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, DAN TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU*.

Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). *PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN*

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG.

Safaruddin, & Basri, S. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(1), 93–105. http://ojs.uho.ac.id/index.php/JURNALAKUNTANSIKEUANGAN/article/view/2026

Sahin, F. (2019). *ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM MENGUKUR KINERJA BADAN RETRIBUSI DAN PAJAK KOTA MEDAN*.

Saskia, N. A., Amin, M., & Junaidi. (2020). *PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PERWUJUDAN NILAI TRANSPARANSI, PENGENDALIAN AKUNTANSI, AKUNTABILITAS, VALUE FOR MONEY TERHADAP PENGELOLAAN AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK*.

Sayuti. (2018). *PERWUJUDAN NILAI-NILAI TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM PENGELOLAAN AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA BAPPEDA KABUPATEN GOWA Skripsi*.

Siti Hartini Amalia. (2019). *PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN*.

Sriwijayanti, H. (2018). Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, *7*(1), 88.

Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). *PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI LAMPUNG*.